

**ANALISIS DISPARITAS PEREKONOMIAN DI WILAYAH JAWA
(JAWA BARAT, JAWA TENGAH , DAN JAWA TIMUR)
PERIODE 1996 – 2011**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat - Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

**SUYATNO
B 300 090 015**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

**ANALISIS DISPARITAS PEREKONOMIAN DI WILAYAH JAWA
(JAWA BARAT, JAWA TENGAH , DAN JAWA TIMUR)
PERIODE 1996 - 2011**

Suyatno (B 300 090 015)

E mail : dharmasuyatno@ymail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAKSI

Disparitas perekonomian merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi, baik di negara maju ataupun negara sedang berkembang. Disparitas perekonomian juga tak dapat dielakkan didalam aktivitas suatu wilayah didalam suatu negara. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Disparitas Perekonomian di Povinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) Periode 1996-2011”. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen yang meliputi PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya tingkat Disparitas Perekonomian dan besarnya pengaruh PDRB, Jumlah penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*) terhadap tingkat Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996- 2011.

Metode yang analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Williamson dan analisis regresi Ordinary Least Square (OLS). Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel Independen dengan variabel dependen model penduga.

Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa disparitas perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) Periode 1996-2011 cukup kecil yaitu, rata-rata di Jawa Barat (0,096), Jawa Tengah (0,214), Jawa Timur (0,086) dan mendekati dengan angka 0 (nol). Di Provinsi Jawa Barat variabel PDRB memiliki pengaruh sebesar (-1,78E-09), Jumlah penduduk (1,53E-08), dan APBD (*sisi pengeluaran*) (-2,28E-09). Di Provinsi Jawa Tengah variabel PDRB memiliki pengaruh sebesar (-1,92E-09), Jumlah Penduduk (5,39E-09), APBD (*sisi pengeluaran*) (-1,38E-09). Sedangkan di Provinsi Jawa Timur variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*) tidak mempengaruhi disparitas Perekonomian.

Kata kunci : Disparitas Perekonomian, PDRB, Jumlah Penduduk, APBD (*sisi pengeluaran*)

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca skripsi dengan judul:

ANALISIS DISPARITAS PEREKONOMIAN DI WILAYAH JAWA (JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR)

PERIODE 1996 - 2011

Yang ditulis oleh:

SUYATNO
B 300 090 015

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk
diterima

Surakarta, Februari 2013

Pembimbing Utama



(Dr. Daryono Soebagyo, M.Ec.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., Ak., M.Si.)

NIP :642

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disparitas perekonomian antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Disparitas ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada daerah masing-masing. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Tingginya suatu disparitas tidak hanya menciptakan ketegangan sosial (*social strain*) tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan serta pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan disparitas pembangunan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2003).

Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah dan memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isu

dan kekhawatiran akan adanya gerakan disintegrasi tersebut akhirnya memunculkan undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab yang sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Otonomi daerah itu sendiri resmi dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2001.

Pulau Jawa sebagai salah satu Pulau besar di Indonesia tidak mungkin terlepas dari masalah ketimpangan perekonomian. Pulau Jawa yang terdiri dari 6 (enam) Provinsi ini tentu saja memiliki berbagai persoalan-persoalan penting yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pembangunan. Aspek pemerataan pembangunan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis :

1. Besarnya tingkat disparitas perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) periode 1996-2011.
2. Besarnya pengaruh jumlah penduduk, laju pertumbuhan PDRB, dan APBD (*sisi pengeluaran*) terhadap tingkat disparitas perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat,

Jawa Tengah, dan Jawa Timur)
periode 1996- 2011.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*) suatu Negara. Sedangkan untuk Daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Teriakkan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003)

Beberapa ahli ekonomi menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2000)

1. Ketahanan (*Sustenance*)
2. Harga diri (*Self Esteem*)
3. *Freedom from servitude*:

B. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Untuk

mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sukirno, 2004).

Formula untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_t = \frac{\text{PDRB riil}_t - \text{PDRB riil}_{t-1}}{\text{PDRB riil}_{t-1}} \times 100$$

Keterangan

Y_t = Pertumbuhan ekonomi

PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto riil

t = Periode tahun

$t-1$ = Periode tahun sebelumnya

a. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik ruang (*space*) terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Tarigan, 2006):

1. Keuntungan Lokasi
2. Aglomerasi Migrasi
3. Arus lalu lintas modal antarwilayah

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Peranan teori ekonomi Neo Klasik tidak terlalu besar dalam menganalisis pembangunan daerah (*regional*), karena teori ini tidak memiliki dimensi spasial yang signifikan. Namun demikian, teori ini memberikan dua konsep penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi.

2. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creatin*) baru.

3. Teori Pertumbuhan Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu Negara menjadi 5 (lima) tahapan :

- a. Tahap ekonomi tradisional
- b. Tahap ekonomi pra tinggal landas
- c. Tahap tinggal landas
- d. Tahap menuju kedewasaan
- e. Tahap konsumsi masyarakat tinggi

4. Teori Pertumbuhan Mahzab Keyneisan

Setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal. Menurut (Harrod Domar), untuk dapat meningkatkan laju perekonomian, diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal (Arsyad, 2010). Teori ini memandang bahwa ada hubungan ekonomis antara stok modal (K) dan tingkat output total (Y) yang dengan istilah capital output ratio = cor = K yaitu:

$$k = \frac{K}{Y} \text{ atau } \frac{\Delta K}{\Delta Y} k \text{ atau } \Delta K = K \cdot \Delta$$

5. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Model pertumbuhan Neo Klasik berpegang pada skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri. Bentuk persamaan formalnya (fungsi produksi agregat standar) yaitu $y = y^a \cdot (AL)^{1-a}$ dimana Y adalah produk domestik bruto, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas kerja (Todaro, 2006)

Dalam model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik dengan menggunakan fungsi *Coob Douglass* yaitu :

$$Q_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Keterangan

Q_t : Tingkat produksi pada tahun t

T_t : Tingkat teknologi pada tahun t

K_t : Jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun t

6. Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan ini menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara Negara maju dan Negara berkembang (Todaro, 2006). Teori ini mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses

pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogenous*) sistem ekonomi itu sendiri (Arsyad, 2010).

C. Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi

Revolusi sosial hampir berawal dari adanya kecemburuan sosial antara golongan sebagai dampak dari kondisi ekonomi dalam masyarakat yang terdiri dari kemiskinan dan ketimpangan, baik ketimpangan antardaerah, antar golongan ataupun ketimpangan antar sektor. Karena itu kerangka pembangunan Nasional Bangsa Indonesia menekankan pada azas “Trilogi pembangunan” yang meliputi *pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas*, ketiga aspek Trilogi pembangunan tersebut merupakan kondisi yang dinamis dan saling bergantian prioritasnya penekannya dalam setiap rencana pembangunan ekonomi.

Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*). Terjadi ketimpangan antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Selain itu (Emilia dan Imelia, 2006) dalam buku Modul Ekonomi Regional faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi adalah:

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

2. Alokasi Investasi

Berdasarkan teori Pertumbuhan Ekonomi dari Harrod Domar menerangkan bahwa adanya korelasi positif antara tingkat Investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya rendahnya Investasi disuatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan kegiatan ekonomi yang produktif.

3. Tingkat Mobilitas Faktor Produksi Yang Rendah Antarwilayah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan kapital antarwilayah merupakan penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Hubungan antara faktor produksi dan kesenjangan pembangunan atau pertumbuhan antarwilayah dapat di jelaskan dengan pendekatan mekanisme pasar.

4. Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antarwilayah

Menurut Kaum Klassik pembangunan ekonomi di daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA. Dengan asumsi SDA dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan selain itu diperlukan faktor-faktor lain yang sangat penting yaitu Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Perbedaan Kondisi Demografi Antarwilayah

Ketimpangan Ekonomi Regional di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan kondisi geografis antarwilayah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja.

6. Kurang Lancarnya Perdagangan Antarwilayah

Kurang lancarnya perdagangan antardaerah (*intra-trade*) merupakan unsur menciptakan ketimpangan ekonomi regional. Tidak lancarnya *Intra-trade* disebabkan adanya keterbatasan transportasi dan komunikasi.

METODE PENELITIAN

C. Objek Penelitian

Wilayah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah 3

(Tiga) Provisi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, dan APBD (*Sisi Pengeluaran*) di (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

E. Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi :

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, yaitu semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi.

b. Jumlah Penduduk

Dalam bukunya (Todaro, 2010) menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah

penduduk pada akhirnya dihubungkan dengan kenaikan kerja, secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi.

c. APBD (Sisi Pengeluaran)

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja (Sukirno, 2000).

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Perhitungan Indeks Williamson

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur
1996	0,074	0,254	0,090
1997	0,051	0,249	0,074
1998	0,139	0,281	0,148
1999	0,129	0,274	0,146
2000	0,161	0,268	0,135
2001	0,154	0,259	0,109
2002	0,147	0,251	0,110
2003	0,137	0,238	0,093
2004	0,128	0,225	0,071
2005	0,114	0,210	0,067
2006	0,096	0,195	0,023
2007	0,076	0,179	0,004
2008	0,056	0,163	0,030
2009	0,044	0,146	0,054
2010	0,023	0,126	0,090
2011	0,002	0,106	0,129
Rata-rata	0,096	0,214	0,086

Sumber : Data Sekunder Diolah

B. Hasil Berdasarkan Analisis Model Ordinary Least Square (OLS)

Berdasarkan hasil analisis pengujian yang dilakukan dengan menggunakan model Ordinary Least Square (OLS). Maka, didapatkan angka parameter pengaruh tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

A. Jawa Barat

1. Perkembangan PDRB

Hasil analisis variabel PDRB di Jawa Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap angka disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar - 0,00000000178 dengan arah negatif, yang berarti menunjukkan setiap kenaikan variabel PDRB sebesar Rp.1 Juta mengakibatkan turunnya tingkat disparitas perekonomian di Jawa Barat sebesar 0,00000000178.

2. Jumlah Penduduk

Hasil analisis variabel Jumlah Penduduk di Jawa Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0000000153 dengan arah positif yang berarti setiap kenaikan Jumlah Penduduk di Jawa Barat sebesar 1 Jiwa mengakibatkan kenaikan tingkat disparitas perekonomian di wilayah tersebut sebesar 0,0000000153.

3. APBD (Sisi Pengeluaran)

Hasil analisis variabel Pengeluaran Pemerintah di Jawa

Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 90%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,00000000228 dengan arah negatif, yang berarti menunjukkan setiap kenaikan variabel APBD (Sisi Pengeluaran) sebesar Rp.1 Juta mengakibatkan turunnya tingkat disparitas perekonomian di Jawa Barat sebesar 0,00000000228.

B. Jawa Tengah

1. Perkembangan PDRB

Hasil analisis variabel PDRB di Jawa Tengah memiliki pengaruh signifikan terhadap angka disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,00000000192 dengan arah negatif, yang berarti setiap kenaikan variabel PDRB di Jawa Tengah sebesar Rp. 1 Juta dapat mengakibatkan penurunan disparitas perekonomian di wilayah tersebut sebesar 0,00000000192.

2. Jumlah Penduduk

Hasil analisis variabel Jumlah Penduduk di Jawa Tengah memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,00000000539 dengan arah positif, yang berarti setiap kenaikan variabel Jumlah Penduduk di Jawa Tengah sebesar

1 Jiwa dapat mengakibatkan naiknya tingkat disparitas perekonomian di wilayah tersebut sebesar 0,00000000539.

3. APBD (Sisi Pengeluaran)

Hasil analisis variabel Pengeluaran Pemerintah di Jawa Tengah memiliki pengaruh signifikan terhadap disparitas pembangunan perekonomian pada derajat kepercayaan 95%. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,00000000138 dengan arah negatif, yang berarti setiap kenaikan variabel APBD (Sisi Pengeluaran) di Jawa Tengah sebesar Rp. 1 Juta dapat mengakibatkan penurunan disparitas perekonomian di wilayah tersebut sebesar 0,00000000138.

C. Jawa Timur

Menunjukkan bahwa variabel independen (PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*) yang dipakai dalam penelitian ini dengan obyek penelitian di Jawa Timur ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen IDW (Disparitas Perekonomian). Hal ini dibuktikan diantara ketiga variabel independen tersebut angka signifikansi yang lebih besar dari level signifikansi 0,05. Artinya hipotesis awal tidak diterima, yang menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap Disparitas Perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis telah dilakukan, maka kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari hasil perhitungan Indeks Williamson (IDW) bahwa disparitas perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) Periode 1996-2011 cukup kecil yaitu, rata-rata di Jawa Barat (0,096), Jawa Tengah (0,214), Jawa Timur (0,086) dan mendekati dengan angka 0 (nol).
2. Dari hasil uji validitas pengaruh (Uji t), menunjukkan bahwa di Provinsi :
 - a. Jawa Barat
 1. Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian di Jawa Barat.
 2. Variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian Jawa Barat.
 3. Variabel APBD (*sisi pengeluaran*) memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian Jawa Barat.
 - b. Jawa Tengah
 4. Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian di Jawa Tengah.
 5. Variabel Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian di Jawa Tengah.
 - c. Jawa Timur
 6. Variabel APBD (*sisi pengeluaran*) memiliki pengaruh signifikan terhadap Disparitas Perekonomian di Jawa Tengah.
3. Dari hasil uji kelayakan model (Uji F) diketahui bahwa di Provinsi:
 - a. Jawa Barat

Dengan melihat angka F statistic yang diperoleh dalam Uji F, menunjukkan bahwa angka tersebut sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\leq \alpha$, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksis.
 - b. Jawa Tengah

Dengan melihat angka F statistic yang diperoleh dalam Uji F, menunjukkan bahwa angka tersebut sebesar 0,000000 lebih kecil dari $\leq \alpha$, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksis.
 - c. Jawa Timur

Dengan melihat angka F statistic yang diperoleh dalam Uji F, menunjukkan bahwa angka tersebut sebesar 0,342262 lebih besar dari α , sehingga model yang

dipakai dalam penelitian tidak eksis.

4. Dari hasil Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan wilayah penelitian :

- a. Jawa Barat

Menyatakan total variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai R-Square adalah sebesar 0,9969, sehingga koefisien determinasi menunjukkan bahwa 99,69% variasi nilai angka Indeks Williamson (IDW) di Jawa Barat dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*). Sedangkan 0,31% lainnya dijelaskan variabel-variabel diluar model.

- b. Jawa Tengah

R-Square menyatakan total variasi *variabel* dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai R-Square adalah sebesar 0,9996, sehingga koefisien determinasi menunjukkan bahwa 99,96% variasi nilai angka Indeks Williamson (IDW) di Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*). Sedangkan 0,04% lainnya dijelaskan variabel-variabel diluar model.

- c. Jawa Timur

R-Square menyatakan total variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai R-Square adalah sebesar 0,2348, sehingga koefisien determinasi menunjukkan bahwa 23,48% variasi nilai angka Indeks

Williamson (IDW) di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, Jumlah Penduduk, dan APBD (*sisi pengeluaran*). Sedangkan 76,52% lainnya dijelaskan variabel-variabel diluar model.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan angka Indeks Williamson (IDW) yang diperoleh atau tingkat Disparitas Perekonomian di Wilayah Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). Maka untuk diharapkan untuk masing-masing WILAYAH JAWA bisa mengambil kebijakan untuk lebih memperkecil tingkat Disparitas Perekonomiannya dengan memaksimalkan pengelolaan potensi sumberdaya yang dimiliki (seperti SDA,SDM) yang berkelanjutan. Khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah yang notabene memiliki angka disparitas yang lebih besar bila dibanding dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, supaya bisa mengambil langkah kebijakan alternatif yang saling menguntungkan dengan kedua Provinsi tersebut, supaya bisa bersama-sama saling memperkecil angka disparitas. Misalnya :
 - a. Meningkatkan pembangunan akses perekonomian yang memadai di wilayah

- perbatasan secara maksimal dan terprogram.
- b. Membentuk kerjasama regional yang saling sinergi dan berkelanjutan.
2. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dalam upaya memperkecil angka Disparitas Perekonomian perlu meningkatkan kapasitas PDRB melalui berbagai sumber yang dimiliki, menekan angka Jumlah Penduduk, dan alokasi pelaksanaan APBD (sisi pengeluaran) yang terarah, sehingga pengambilan kebijakan anggaran ataupun kebijakan lain yang berkaitan tepat sasaran sehingga mampu memberikan efek positif dalam menekan angka disparitas.
 3. Bagi warga masyarakat sebisa mungkin diharapkan untuk membantu meminimalisir angka Disparitas Perekonomian dengan cara :
 - a. Menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kerja, sehingga mampu memperkuat sektor tenaga kerja.
 - c. Menjalankan program pemerintah Keluarga Berencana (KB), sehingga mampu menekan peningkatan jumlah penduduk.
 4. Bagi peneliti selanjutnya yang terkait, diharapkan untuk memasukan atau menambahkan variabel lain yang dapat

mempengaruhi tingkat Disparitas Perekonomian (seperti Investasi, Inflasi, Ekspor Netto).

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari.1997. *Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi*, Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada,
- Angelia, Yuki.2010. *Anilisi Ketimpangan Pembangunan Wilayah Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008*. Sripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta : UI Press.
- Arifin, Zainal.2009. *Kesenjangan dan Konvergensi Antar Kabupaten Pada Empat Koridor Di Provinsi Jawa Timur*, HUMANITY, Vol/IV, Nomor 2, Maret 2009: 154 – 164. Malang.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- _____.1999. *Pembangunan Ekonomi Daerah*. STIE YKPN.
- _____.2000. *Modul Analisis Potensi Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta.

- Badan Pusat Statistik.1996-2011. *Indonesia Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- _____.1996-2011. *Jawa Barat Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- _____.1996-2011. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang.
- _____.1996-2011. *Jawa Timur Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Semarang
- Bhinadi,Ardito. 2003. *Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa Dengan Luar Jawa*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol.08/2003 UPN,hal 39-48. Yogyakarta.
- Capello, Roberta & Nijkamp, Peter (2004), *The Theoretical and Methodological Toolbox of Urban Economics: From and Towards Where?* , Urban Dynamics and Growth, CEA, vol. 266.
- Capello, Roberta(ed.).2006. *Handbook of regional growth and development theories*.
- Castel,S. Dan M.J. Miller.2003. *The Age Of Migration,Third Edition*. London: MacMillan Press.
- Chadhiq, Umar Dkk.2010. *Analisis Penerapan Metode Basis dan Shit Share dalam Mengatasi Tingkat Disparitas Pendapatan Antar Wilayah di Provinsi Jawa Tengah*.ISBN:978.979.704.883.9. Semarang.
- Dedeirawan.2012. *Konsep Disparitas Pembangunan Ekonomi (Online)*, (<http://wordpress.com/>, diakses tanggal 20 November 2012).
- Emilia dan Imelia.2006.*Modul Ekonomi Regional*. Jurusan Ilmu Ekonomi, FE.Universitas Jambi. Jambi.
- Gama, Ayu Savitri. 2006. *Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, vol.1/2006 Unud,hal 38-48. Bali.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Issue of Dependency and Economic Development dalam "The Political Economy of International Relations"*. Princeton: Princeton University Press.
- Gujarati,Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 1999. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.

- Hermanto.2000. *Analisis Spesialisasi Regional Propinsi Kalimantan Tengah*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, vol.1 No. 1/2000 UMY,hal 45-72. Yogyakarta.
- Internet.2012.immigration.(online)(<http://www.globalissues.org/article/537/immigration> diakses pada 06 Desember 2012).
- _____.2012. *APBD-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Online)* (<http://www.ilmuekonomi.com>, diakses tanggal 02 Desember 2012).
- Irawan.2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Jhingan, ML.1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johnson, David W,Roger T Johnson.1998.*Cooperative Learning and social Independence Theory: Cooperative Learning – Together We Stand, Divided We All* (online).(http://www.clcre.com/page.SIT/html. diakses 10 Desember 2012).
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesoebroto. 1998. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia: Substansi dan Urgensi*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.
- OECD. 2012. *Devided We Stand: Why Inequality Keeps Increasing*.
- Salvatore, Dominick dan Wm Alan Bartey. 2004. *“Prinsip-prinsip ekonomi ; berdasarkan schum’s outline of theory and problem of principles of economics”*. Second Edition. Jakarta:Erlangga.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Soebagyono, Daryono. 2000. *Disparitas Pembangunan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Studi Kasus di Daerah SUMBAGSEL)*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, vol.1/2000 UMS,hal 21-34. Surakarta.
- Solihin, Dadang,2005. *Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Absolut* FE-Universitas Darma Persada : Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. *Pembangunan ekonomi melalui pengembangan*

- pertanian (Economic development through agricultural development)*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Syaukani,HR dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Tarigan, Robinson, 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith, 2010. *“Pembangunan Ekonomi”* Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 2006. *“Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga”*. Alih Bahasa: Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang – Undang No. 32 tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang – Undang No. 33 tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- WEF. 2010. *The Global Competitiveness Report*. 2010-2011.
- WEF. 2011. *The Global Competitiveness Report*. 2011-2012.
- Wicaksono,Cholif P.2010. *Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Wikipedia. 2012. *Geografi Indonesia (Online)*,(<http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses tanggal 30 November 2012).
- Yosi Agresia, Stefani. 2012. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Rembang*. Sripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.